

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DI DUSUN III DESA SEGAYAM KECAMATAN GELUMBANG KABUPATEN MUARA ENIM

Lusi Sundari, Alfiandra, Sri Artati Waluyati

lusisundari286@yahoo.co.id

Abstrac: The objective of this study was to determine people's political participation in Hamlet III village Gelumbang Segayam District of Muara Enim Regency based on the level of education. Theoretically, this study is expected to support previous theories related to political participation in Hamlet III village communities Segayam Gelumbang District of Muara Enim regency while practical devices may be useful for village and community Segayam villages and hamlets III for the researchers themselves. This research is experimental research, which is the population of the whole society becomes Hamlet III village Segayam who already have the right to choose which numbered 444 people. While the sample is Hamlet III village communities Segayam which consists of four levels, namely 15 Elementary school (SD), 15 the level of junior high school (SMP), 15 the level of high school (SMA) and 5 levels of Higher Education. In sampling, the researcher uses disproportional stratified random sampling technique. Data collection techniques used are documentation, interviews and questionnaires or questionnaire. Data analysis technique used in this study was the ANOVA test and Tukey test. From the research results through ANOVA test obtained significant value $.00 < .05$, meaning that there are differences in people's political participation levels among the four groups in Hamlet III village Gelumbang Segayam District of Muara Enim regency. Further testing is then performed with the Tukey test, the output of Homogeneous subsets apparent that every level of education has a different value SD scored 69.40, 76.93 Junior High, High School and Higher Education 85.33 101.60. The conclusion that can be drawn in this study is the higher the education level, the higher the political participation of the people in Hamlet III village Segayam Gelumbang District of Muara Enim regency.

Keywords: Public Political Participation, Education Level.

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan di Dusun III Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat di Dusun III Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim berdasarkan tingkat pendidikannya. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mendukung teori-teori sebelumnya yang berhubungan dengan partisipasi politik masyarakat di Dusun III Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim sedangkan secara praktis semoga bermanfaat bagi perangkat desa dan masyarakat dusun III desa Segayam serta bagi peneliti sendiri. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen, yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat Dusun III Desa Segayam yang sudah memiliki hak pilih yaitu berjumlah 444 orang. Sedangkan sampel adalah masyarakat Dusun III Desa Segayam yang terdiri dari empat tingkat pendidikan yaitu 15 orang tingkat Sekolah Dasar (SD), 15 orang tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), 15 orang tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 5 orang tingkat Pendidikan Tinggi. Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik *disproportional stratified random sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara dan kuesioner atau angket. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah uji Anova dan uji *Tukey*. Dari hasil penelitian melalui uji Anova diperoleh nilai signifikan $.00 < .05$, artinya terdapat perbedaan partisipasi politik masyarakat diantara empat kelompok tingkat pendidikan di Dusun III Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Kemudian dilakukan uji lanjutan yaitu dengan uji *Tukey*, pada output *Homogeneous Subsets* terlihat jelas bahwa setiap tingkat pendidikan memiliki nilai yang berbeda. SD memperoleh nilai 69.40, SMP 76.93, SMA 85.33 dan Pendidikan Tinggi 101.60. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula partisipasi politik masyarakat di Dusun III Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.

Kata kunci : Partisipasi Politik Masyarakat, Tingkat Pendidikan.

PENDAHULUAN

Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari

sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Rush dan

Althoft (dalam Gatara, 2008: 310) mengemukakan bahwa: "Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada macam-macam tingkatan di dalam sistem politik". Indikatornya adalah berwujud keterlibatan individu dalam sistem politik dan memiliki tingkatan-tingkatan partisipasi. Pendapat lain dikemukakan oleh Hardwic (dalam Gatara, 2008: 310) "Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut. Indikatornya adalah terdapat interaksi antara warga negara dengan pemerintah dan terdapat usaha warga negara untuk mempengaruhi pejabat publik".

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam demokrasi karena keputusan politik yang diambil oleh pemerintah akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Karena itu masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik serta untuk tidak dilanggarnya hak-hak sebagai warga negara dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam konteks negara, partisipasi politik rakyat adalah keterlibatan rakyat secara perseorangan untuk mengerti, menyadari, mengkaji, melobi, dan memprotes suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan mempengaruhi kebijakan agar aspiratif terhadap kepentingan mereka. Maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi rakyat bisa dipahami sebagai keterlibatan rakyat serta hubungan negara dan masyarakat.

Partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Rasa kesadaran dimulai dari orang yang berpendidikan, yang kehidupannya lebih baik. Tilaar (2012: 464 - 466) menyatakan bahwa "pendidikan telah dijadikan prioritas utama dan pertama dari banyak negara untuk dijadikan sebagai fondasi membangun masyarakat yang lebih demokratis, terbuka bagi perubahan-perubahan global dan menghadapi masyarakat digital. Pakar-pakar ekonomi, juga pakar-pakar kebudayaan dan politik melihat betapa pendidikan merupakan aspek yang sangat strategis di dalam menyiapkan suatu tata kehidupan manusia". Tingkat kesadaran politik setiap anggota masyarakat tidaklah sama. Hal ini sangat

bergantung pada latar belakang pendidikannya. Kaum elite dan menengah tampak relatif lebih baik. Sedangkan masyarakat yang berlatar belakang pendidikan lebih rendah memerlukan pembinaan yang intensif. Menurut M. Taopan (dalam Budiyanto, 2007: 185) "kesadaran politik adalah suatu proses batin yang menampakkan keinsafan dari setiap warga negara akan *urgensi* urusan kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara". Kesadaran politik atau keinsafan hidup bernegara menjadi penting dalam kehidupan kenegaraan, mengingat tugas-tugas negara bersifat menyeluruh dan kompleks sehingga tanpa dukungan positif dari seluruh warga masyarakat, tugas-tugas negara banyak yang terbengkalai.

Desa Segayam terletak di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Masyarakat di desa ini berjumlah 2864 orang yang terbagi dalam tiga dusun. Gambaran kondisi tingkat pendidikan penduduk desa Segayam menunjukkan sebagian besar penduduk berpendidikan Sekolah Dasar (SD), secara teoritis seperti yang telah diuraikan akan mempengaruhi partisipasi politik mereka. Indikasi awalnya seperti bersikap apatis (orang yang menarik diri dari proses politik), tidak punya perhatian terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah, partisipasi dalam organisasi dan sebagainya. Dari hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan pada bulan Januari 2013. Diperoleh data berdasarkan hasil wawancara kepada empat orang masyarakat dusun III desa Segayam dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda bahwa tidak sedikit dari mereka yang bersikap apatis, tidak peduli dengan kegiatan kampanye dan tidak terpengaruh dengan jabatan politik dalam pemerintahan. Sebagian besar dari mereka hanya ikut memilih dalam pemilihan umum saja. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimanakah partisipasi politik masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan di Dusun III Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim?". Sedangkan tujuan yang ingin dicapai yaitu: "untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat di Dusun III Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim berdasarkan tingkat pendidikannya".

Mengenai partisipasi politik Budiardjo (dalam Abdulkarim, 2004: 119) mengemukakan bahwa: "Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan

jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*)". Closky (dalam Gatara, 2008: 310) memberikan pengertian tentang partisipasi politik bahwa "partisipasi politik ialah kegiatan-kegiatan sukarela (*voluntary*) dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembuatan atau pembentukan kebijakan umum".

Salah satu bentuk partisipasi politik ialah memberikan suara dalam pemilihan umum. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Penerbit Citra Umbara, 2012: 16) diatur tentang hak memilih (berpartisipasi dalam politik) yaitu diatur dalam Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi: "Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin mempunyai hak memilih".

Tingkatan partisipasi politik menurut Rush dan Althoff (2008: 122):

- a. Menduduki jabatan politik atau administratif
- b. Mencari jabatan politik atau administratif
- c. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik
- d. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik
- e. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik (*quasi-political*)
- f. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik (*quasi-political*)
- g. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya
- h. Partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam bidang politik
- i. Voting (pemberian suara)

Tingkatan partisipasi politik, mencerminkan kapasitas partisipan dalam berpartisipasi politik. Semakin tinggi tingkatan yang ditempati, maka semakin tinggi pula tingkatan partisipasi politiknya. Dalam lingkup partisipasi politiknya, jika semakin tinggi maka semakin sedikit (semakin mengerucut pada jumlah tertentu). Voting merupakan tingkatan partisipasi politik terendah, yang membedakan satu tingkat di atas orang yang apatis total, sementara di atasnya terdapat orang atau sekelompok orang yang sering terlibat dalam diskusi-diskusi politik informal, yang proporsinya

lebih rendah, namun intensitasnya lebih tinggi. Menurut Milbrath dan Goel (dalam Abdulkarim, 2004: 120), partisipasi politik dapat dilihat dari beberapa kategori yaitu: Pertama, *apatis* adalah orang yang menarik diri dari proses politik. Kedua, *spektator* adalah orang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut dalam pemilihan umum. Ketiga, *gladiator* adalah orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni sebagai komunikator dengan tugas khusus mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, serta aktivis masyarakat. Keempat, pengkritik yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional.

Menurut Gatara (2008: 312) ada dua kriteria tingkat-tingkat partisipasi politik. "Pertama, dilihat dari ruang lingkup atau proporsi dari satu kategori warga negara yang melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan partisipasi politik. Kedua, intensitasnya, atau ukuran, lamanya, dan arti penting dari kegiatan khusus itu bagi sistem politik". Hubungan tingkat-tingkat partisipasi tampak dalam hubungan "berbanding terbalik". Lingkup partisipasi politik yang besar biasanya terjadi dalam intensitas yang kecil atau rendah, misalnya partisipasi dalam pemilihan umum. Sebaliknya, jika lingkup partisipasi rendah atau kecil, intensitasnya semakin tinggi. Contoh: kegiatan aktivis-aktivis partai politik, pejabat partai politik, dan kelompok-kelompok penekan. Jadi, dalam hal ini semakin luas ruang lingkup partisipasi politik, maka semakin rendah atau kecil hasil intensitasnya. Dan sebaliknya, semakin kecil ruang lingkup partisipasi politik, intensitasnya semakin tinggi. Pada tingkat pengamat, seperti meng-hadiri rapat umum, memberikan suara dalam pemilu, menjadi anggota kelompok kepentingan-an, mendiskusikan masalah politik, perhatian pada perkembangan politik, dan usaha meyakinkan orang lain, merupakan contoh-contoh kegiatan yang banyak dilakukan oleh warga negara, artinya proporsi atau lingkup jumlah orang yang terlibat di dalamnya tinggi. Namun tidak demikian dengan intensitas partisipasi politiknya, terutama kalau dikaitkan dengan arti pentingnya bagi sistem politik, praktik-praktik tersebut pengaruhnya rendah atau tingkat efektivitasnya dalam mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah, membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup banyak. Pada kategori aktivis, para pejabat umum, pejabat partai penuh waktu, pimpinan kelompok kepentingan merupakan pelaku-pelaku politik

yang memiliki intensitas tinggi dalam berpartisipasi politik. Mereka memiliki akses yang cukup kuat untuk melakukan *contacting* dengan pejabat-pejabat pemerintah, sehingga upaya-upaya untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah menjadi sangat efektif. Terutama bagi pejabat umum, secara politis mereka memiliki peluang yang cukup kuat dalam mempengaruhi kebijakan politik yang dibuat pemerintah, bahkan secara individual bisa mempengaruhi secara langsung. Namun warga negara yang terlibat dalam praktik-praktik partisipasi politik di tingkat aktivis jumlahnya terbatas, hanya diperuntukkan bagi sejumlah kecil orang (terutama elit politik), yang memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses politik dengan mekanisme dan kekuatan pengaruh seperti ini.

Menurut UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (dalam <http://www.inherent-dikti.net/files/sisdiknas.pdf>, diakses tanggal 18 februari 2013 pukul 10:26) pada pasal 1 poin 8 dijelaskan “ jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan”.

Menurut Sikula dalam Mangkunegara (2003:50) tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan-tujuan umum. Jenjang pendidikan formal seperti yang tertuang dalam UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 BAB VI Pasal 14 yang menyatakan bahwa: “jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi”.

Zamroni (2003: 120) menjelaskan bahwa: “Suatu sistem politik akan bisa langgeng jikalau mendapat dukungan dari warga masyarakat. Oleh karena itu, setiap bangsa, atau lebih tepatnya penguasa baik yang memiliki sistem kapitalis, komunis, sosial atau apapun sistem politik yang dianut penguasa tersebut, perlu melaksanakan sosialisasi politik, khususnya di kalangan remaja. Hal ini bertujuan agar mereka memiliki pengetahuan politik, kesadaran politik, nilai, sikap dan orientasi politik, dan mampu berpartisipasi dalam politik, sehingga aktif memberikan dukungan dan kelak bisa melanggengkan sistem politik yang dianut selama ini. Tanpa adanya keberhasilan dalam sosialisasi politik akan muncul

gejolak politik yang berkepanjangan yang merupakan pencerminan tidak adanya dukungan warga masyarakat terhadap sistem politik yang ada, yang akan membawa akibat sistem politik runtuh atau diganti”. Oleh karena itu, setiap pemerintahan negara demokratis akan melaksanakan sosialisasi nilai-nilai demokrasi di kalangan generasi muda. Hal ini dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal, non formal dan informal. Jalur formal (persekolahan) yaitu melalui tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Amriani (dalam <http://amriani.hamzah.blogspot.com/2013/01/hubungan-politik-dengan-pendidikan.html>, diakses tanggal 14 september 2013 pukul 20:38) menyatakan bahwa: “Hubungan antara pendidikan dan politik bukan sekedar hubungan saling memengaruhi, tetapi juga hubungan fungsional. Lembaga-lembaga dan proses pendidikan menjalankan sejumlah fungsi politik yang signifikan. Mungkin yang terpenting dari fungsi-fungsi tersebut bahwa sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya menjadi agen-agen sosialisasi politik. Lembaga-lembaga pendidikan menjadi tempat dimana individu-individu, terutama anak-anak dan generasi muda, mempelajari sikap-sikap dan perasaan tentang sistem politik, dan sejenis peran politik yang diharapkan dari mereka”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen, dengan pendekatan kuantitatif. Variabel penelitian adalah Partisipasi Politik (variabel bebas) dan Tingkat Pendidikan (variabel terikat). Populasi penelitian adalah seluruh masyarakat Dusun III Desa Segayam yang sudah memiliki hak pilih yaitu berjumlah 444 orang. Sedangkan sampel adalah masyarakat Dusun III Desa Segayam yang terdiri dari empat tingkat pendidikan yaitu 15 orang tingkat Sekolah Dasar (SD), 15 orang tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), 15 orang tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 5 orang tingkat Pendidikan Tinggi. Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik *disproportional stratified random sampling*.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara dan kuesioner atau angket. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan oleh peneliti untuk

memperoleh data secara umum yaitu tentang jumlah penduduk dusun III desa segayam yang memiliki hak pilih, tingkat pendidikan, dan foto-foto partisipasi masyarakat dalam PEMILU. Metode wawancara peneliti gunakan untuk mewawancarai sekretaris Desa Segayam Kecamatan Gelumbang untuk memperoleh data yang berhubungan dengan partisipasi politik yang dipengaruhi tingkat pendidikan masyarakat Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Pada teknik kuesioner atau angket peneliti menggunakan skala sikap model skala Likert yaitu responden diminta untuk mengisi salah satu kotak diantara empat jawaban yang disertakan sesuai dengan pilihannya (Ridwan, 2011: 13). Adapun tujuan penyebaran angket ini untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan di Dusun III Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim.

Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah uji Anova dan uji *Tukey* (Beda Nyata Jujur). *Analysis of varian* (Anova) digunakan untuk menguji perbedaan mean (rata-rata) data lebih dari dua kelompok. Caranya sama dengan uji homogenitas varians dimana nilai signifikansi pada Sig. dibandingkan dengan nilai signifikansi yang digunakan (SPSS secara default menggunakan nilai signifikansi 0,05). Untuk pengujian Anova, apabila nilai probabilitas yang tercantum pada kolom Sig. >0,05 maka H_0 diterima. Apabila probabilitas <0,05 maka H_0 ditolak. Output *Post Hoc Tests* pada uji *Tukey* digunakan untuk mengetahui variabel mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Cara menganalisisnya dengan melihat ada tidaknya tanda * pada kolom Mean Difference atau dengan melihat nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi <0,05, hal ini menunjukkan adanya perbedaan. Apabila output *Post Hoc Tests* digunakan untuk mencari variabel mana yang mempunyai perbedaan mean, maka output *Homogeneous Subsets* digunakan untuk mengetahui sampel/ variabel mana yang mempunyai perbedaan yang tidak terlalu signifikan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data hasil wawancara peneliti gunakan untuk melengkapi data angket yang peneliti sebarkan kepada 50 orang yang terdaftar sebagai pemilih tetap di Dusun III Desa Segayam sehingga

data yang peneliti dapatkan memiliki tingkat kepercayaan data yang tinggi. Wawancara telah dilaksanakan pada tanggal 6 November 2013 di Kediaman Sekretaris Desa Segayam Kecamatan Gelumbang. Wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara terstruktur, dimana peneliti telah menyiapkan panduan atau pedoman untuk wawancara. Untuk mendapatkan hasil wawancara, peneliti menggunakan alat bantu perekam dan alat tulis. Berikut tahapan pengumpulan data dalam wawancara:

1. Tahapan persiapan, peneliti menyusun panduan wawancara.
2. Tahapan pelaksanaan, peneliti melakukan wawancara dengan responden.
3. Terakhir, peneliti menarik kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan responden.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan sekretaris desa Segayam. Pada pertanyaan pertama dalam kegiatan kampanye, apakah masyarakat Desa Segayam selalu mengikuti kegiatan tersebut untuk mengetahui visi, misi dan program kerja dari peserta PEMILU. Diketahui dari jawaban Sekdes bahwa dalam kegiatan kampanye, tidak selalu dan semua masyarakat Desa Segayam mengikuti kegiatan kampanye. Hanya masyarakat yang paham politik saja yang aktif mengikuti kegiatan-kegiatan kampanye. Selanjutnya pertanyaan kedua mengenai respon masyarakat Desa Segayam, peneliti menanyakan bagaimana respon masyarakat desa Segayam dengan adanya sosialisasi politik. Sekdes menjawab, banyak respon yang ditimbulkan. Hal ini juga disebabkan dari adanya perbedaan tingkat pendidikan di desa Segayam, biasanya masyarakat yang berpendidikan akhir sekolah menengah atas dan pendidikan tinggi jauh lebih antusias dan cepat memahami penyuluhan. Kemudian pertanyaan ketiga mengenai banyaknya tingkat pendidikan SD di Desa Segayam, peneliti menanyakan apakah berpengaruh banyaknya tingkat pendidikan SD terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat di Desa Segayam. Sekdes mengatakan tentu saja berpengaruh, karena pada umumnya masyarakat yang berpendidikan akhir SD cenderung lebih apatis dan tidak mau tahu tentang politik.

Selanjutnya yang keempat peneliti menanyakan, jika berpengaruh pernahkah pemerintah setempat melakukan sosialisasi politik dan dalam bentuk apa sosialisasi yang dilakukan.

Jawaban Sekretaris Desa Segayam adalah sering, apalagi menjelang PEMILU. Pihak pemerintah setempat melakukan sosialisasi politik dalam bentuk penyuluhan dan menerangkan tata cara pencoblosan dalam PEMILU. Selanjutnya pertanyaan kelima dalam kegiatan sosialisasi politik, peneliti menanyakan apakah dalam sosialisasi politik tersebut masyarakat antusias mengajukan pertanyaan. Sekdes mengatakan bahwa tidak juga, hanya masyarakat yang tingkat pendidikan menengah dan tinggi saja yang antusias mengajukan pertanyaan. Walaupun ada masyarakat yang berpendidikan Sekolah Dasar yang mengajukan pertanyaan, itu hanya satu atau dua orang saja. Kemudian pertanyaan yang terakhir mengenai masyarakat yang berpendidikan tinggi, apakah masyarakat yang berpendidikan tinggi turut mensukseskan program sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Sekdes mengatakan iya, masyarakat yang berpendidikan tinggi disini tidak segan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat yang belum mengerti atau paham dalam hal ini adalah masyarakat yang berpendidikan akhir Sekolah Dasar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari deskripsi data hasil angket untuk indikator satu diketahui bahwa untuk kelompok SD dengan rata-rata persentase 80% menyatakan tidak setuju. Pada kelompok SMP diperoleh rata-rata persentase 48% menyatakan tidak setuju dan 41,5% menyatakan setuju. Selanjutnya kelompok SMA dengan rata-rata persentase 55% menyatakan setuju dan untuk kelompok pendidikan tinggi diperoleh rata-rata persentase 70% menyatakan setuju. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat kelompok pendidikan tinggi memiliki tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi pada indikator satu yaitu ikut kampanye dan tingkat partisipasi politik yang paling rendah terdapat pada masyarakat kelompok SD. Selanjutnya pada indikator dua, diperoleh rata-rata persentase 56,5% menyatakan setuju untuk masyarakat kelompok SD. Pada kelompok SMP diperoleh rata-rata persentase 46,5% menyatakan setuju dan 40% menyatakan sangat setuju. Selanjutnya kelompok SMP diperoleh rata-rata persentase 68% menyatakan sangat setuju. Kemudian pada kelompok pendidikan tinggi diperoleh rata-rata persentase 80% menyatakan sangat setuju. Hal ini berarti bahwa semua kelompok tingkat pendidikan memiliki partisipasi politik yang baik pada indikator ikut memilih dalam pemilihan umum. Dan kelompok

pendidikan tinggi memiliki tingkat partisipasi politik yang tertinggi dibandingkan kelompok SD, SMP dan SMA.

Kemudian untuk indikator tiga “menjadi anggota aktif dalam partai politik”. Pada masyarakat kelompok SD diperoleh rata-rata persentase 71,5% menyatakan tidak setuju. Diperoleh rata-rata persentase 57% menyatakan tidak setuju untuk kelompok SMP. Kemudian kelompok SMA diperoleh rata-rata persentase 45% menyatakan tidak setuju dan 35% menyatakan setuju. Selanjutnya diperoleh rata-rata persentase 70% menyatakan setuju pada kelompok pendidikan tinggi. Artinya partisipasi politik masyarakat pendidikan tinggi menduduki tingkat yang tertinggi pada indikator ketiga dan kemudian diikuti oleh masyarakat kelompok SMA. Pada indikator empat, kelompok SD memperoleh rata-rata persentase 65% menyatakan tidak setuju. Selanjutnya untuk kelompok SMP diperoleh 47% menyatakan tidak setuju dan 45% menyatakan setuju. Kemudian kelompok SMA menyatakan setuju dengan rata-rata persentase 63%. Dan pada kelompok pendidikan tinggi diperoleh rata-rata persentase 60% menyatakan setuju. Dengan demikian, pada indikator empat partisipasi politik masyarakat yang tertinggi ditempati oleh masyarakat kelompok SMA dan kemudian diikuti oleh kelompok pendidikan tinggi. Selanjutnya pada indikator lima, diperoleh rata-rata persentase 81% menyatakan tidak setuju untuk kelompok SD. Pada kelompok SMP diperoleh rata-rata persentase 61% menyatakan tidak setuju. Dengan rata-rata persentase 71% menyatakan tidak setuju diperoleh oleh kelompok SMA. Kemudian untuk kelompok pendidikan tinggi diperoleh rata-rata persentase 57% menyatakan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok pendidikan tinggi memiliki partisipasi politik yang tinggi. Pada indikator enam, untuk masyarakat kelompok SD diperoleh rata-rata persentase 71% menyatakan tidak setuju. Diperoleh rata-rata persentase 52% menyatakan tidak setuju untuk kelompok SMP. Pada kelompok SMA diperoleh rata-rata persentase 38% menyatakan setuju dan 37% menyatakan tidak setuju. Kemudian pada kelompok pendidikan tinggi diperoleh rata-rata persentase 75% menyatakan setuju. Artinya kelompok pendidikan tinggi memiliki tingkat partisipasi politik tertinggi dan tingkat partisipasi politik terendah dimiliki oleh kelompok SD. Terakhir pada indikator tujuh diperoleh rata-rata persentase 71% menyatakan tidak setuju untuk

kelompok SD. Pada kelompok SMP diperoleh rata-rata persentase 57% menyatakan setuju. Rata-rata persentase 65% menyatakan setuju diperoleh oleh kelompok SMA. Dan pada kelompok pendidikan tinggi diperoleh rata-rata persentase 60% menyatakan setuju. Dengan demikian kelompok SMA memiliki partisipasi politik yang tinggi, kemudian diikuti oleh kelompok pendidikan tinggi dan SMP.

Berdasarkan pembahasan di atas diketahui bahwa dari ketujuh indikator yang menjadi tolak ukur peneliti terlihat bahwa kelompok pendidikan tinggi memiliki partisipasi politik yang tinggi dibandingkan kelompok SMA dan SMP. Sedangkan kelompok SD memiliki partisipasi politik yang paling rendah. Menurut Roth dan Wilson (dalam Gatara, 2008: 313) "Tingkatan partisipasi politik berbentuk piramida. Semakin tinggi tingkat partisipasi politik, semakin tinggi tingkat intensitasnya, dan semakin kecil luas cakupannya. Sebaliknya semakin menuju ke bawah, semakin besar lingkup partisipasi politik dan semakin kecil intensitasnya. Tingkatannya dari paling bawah, yaitu orang yang apolitis, kelompok pengamat, kelompok partisipan, kelompok aktivis, dan yang paling atas yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan menyimpang dalam bidang politik". Teori Roth dan Wilson di atas menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) termasuk orang yang apolitis. Masyarakat kelompok SMP tergolong kelompok pengamat. Sedangkan masyarakat yang berpendidikan akhir SMA termasuk golongan kelompok partisipan dan terakhir masyarakat kelompok pendidikan tinggi dapat dikatakan golongan kelompok aktivis.

Berdasarkan hasil output SPSS, didapatkan data uji Anova dengan nilai signifikan 0,000 yang berarti <0,05, hal ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil adalah menerima H_a dan menolak H_0 yang berarti bahwa terdapat perbedaan partisipasi politik masyarakat diantara empat kelompok tingkat pendidikan di Dusun III Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Kemudian dilanjutkan dengan uji Tukey yang digunakan untuk mengetahui sampel/variabel mana yang mempunyai perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Pada output *Homogeneous Subsets* terlihat jelas bahwa setiap tingkat pendidikan memiliki nilai yang berbeda. SD memperoleh nilai 69.40, SMP 76.93, SMA 85.33 dan Pendidikan Tinggi 101.60. Artinya semakin

tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula nilai yang didapatkan. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pula partisipasi politik masyarakat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori Subakti (dalam Sastroatmodjo, 1995: 90) yang menjelaskan bahwa: "Tingkat pendidikan masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Makin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi partisipasi politik masyarakat. Semakin rendah tingkat pendidikan makin rendah pula partisipasi politiknya atau seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang akan lingkungan masyarakat dan politik disekitarnya dan menyangkut minat dan perhatiannya terhadap lingkungannya".

Maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah partisipasi politik masyarakat Dusun III Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim berbeda-beda berdasarkan tingkat pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pula partisipasi politik masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan partisipasi politik masyarakat diantara empat kelompok tingkat pendidikan di Dusun III Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Hal ini terbukti dari hasil uji Anova menggunakan SPSS Windows 21, yang diperoleh nilai signifikan 0,000 yang berarti <0,05. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil adalah menerima H_a dan menolak H_0 . Kemudian dilakukan uji lanjutan yaitu dengan uji Tukey yang digunakan untuk mengetahui sampel/variabel mana yang mempunyai perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Pada output *Homogeneous Subsets* terlihat jelas bahwa setiap tingkat pendidikan memiliki nilai yang berbeda. SD memperoleh nilai 69.40, SMP 76.93, SMA 85.33 dan Pendidikan Tinggi 101.60. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula nilai yang didapatkan. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula partisipasi politik masyarakat di Dusun III Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan simpulan di atas, maka peneliti menyarankan kepada Perangkat Desa Segayam kiranya dapat lebih meningkatkan sosialisasi politik kepada masyarakat di Desa

Segayam terutama menjelang pemilihan umum dan kepada seluruh masyarakat desa Segayam khususnya masyarakat Dusun III Desa Segayam, diharapkan untuk lebih meningkatkan partisipasi dalam bidang politik yang mana bertujuan untuk kemajuan Desa dan Kabupaten Muara Enim sendiri.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulkarim, Aim. 2004. *Kewarganegaraan*. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiyanto. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta; Erlangga.
- Gatara, A.A. Sahid. 2008. *Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Huntington, Samuel P. dan Nelson, Joan M. 1984. *Partisipasi Politik*. Jakarta: Sangkala Pulsar.
- Mangkunegara. 2003. *Pendidikan Sosial*. Yogyakarta: Kanisius.
- Maksudi, Beddy Iriawan. 2012. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ridwan. 2011. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Rush, Michael dan Althoff, Phillip. 2008. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Subana.M., Sudrajat. 2005. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia Bandung.
- Sudijono, Anas. 2008. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2009. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono, Partana. 2004. *Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Akapres.
- Tilaar, H.A.R. *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. 2012. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 2012. Bandung: Citra Umbara.
- Universitas Sriwijaya. 2012. *Buku Pedoman Universitas Sriwijaya*. Inderalaya: Percetakan dan Penerbit Universitas Sriwijaya.
- Zamroni. 2003. *Pendidikan untuk Demokrasi*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.